PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

# RENCANA KERJA
# (RENJA – SKPD)
## INSPEKTORAT
## KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025

INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPIN
2024

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
28. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 10);
29. Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
(2) Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun RKA SKPD Tahun Anggaran 2025.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB III
PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2005 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB : PENUTUP
(2) Uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. RSUD Datu Sanggul sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
i. Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
j. Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
k. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
l. Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
m. Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

q. Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
r. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
t. Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
u. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
w. Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
x. Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
y. Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
z. Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
aa. Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
bb. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
cc. Kecamatan Piani sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
dd. Kecamatan Lokpaikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
ee. Kecamatan apin Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

ff. Kecamatan Bakarangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
gg. Kecamatan Candi Laras Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
hh. Candi Laras Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
ii. Kecamatan Hatungun sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
jj. Kecamatan Salam Babaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
kk. Kecamatan Tapin Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
ll. Kecamatan Tapin Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
mm. Kecamatan Binuang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
nn. Kecamatan Bungur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
oo. Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
pp. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
qq. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
rr. Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
ss. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 11 Juli 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 11 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

SUFIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 NOMOR 10

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kaupaten Tapin Tahun 2025 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen Renja ini.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin, Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupeten Tapin Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Renja ini juga diharapkan dapat memberikan arah kepada segenap karyawan dan manajemen Inspektorat Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2025 ini masih belum sempurna, segala komentar, saran, kritik mau pun tanggapan demi penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evalusi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten Tapin menyusun Dokumen Rancangan Awal Renja 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tapin.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Inspektorat Kabupaten Tapin membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan Inspektorat yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Tapin dapat berperan secara optimal membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Tapin.

### 1.1.1 Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Inspektorat Kabupaten Tapin merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tapin yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sesuai Peraturan Bupati Tapin No. 11 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

### 1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja
- Orientasi mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

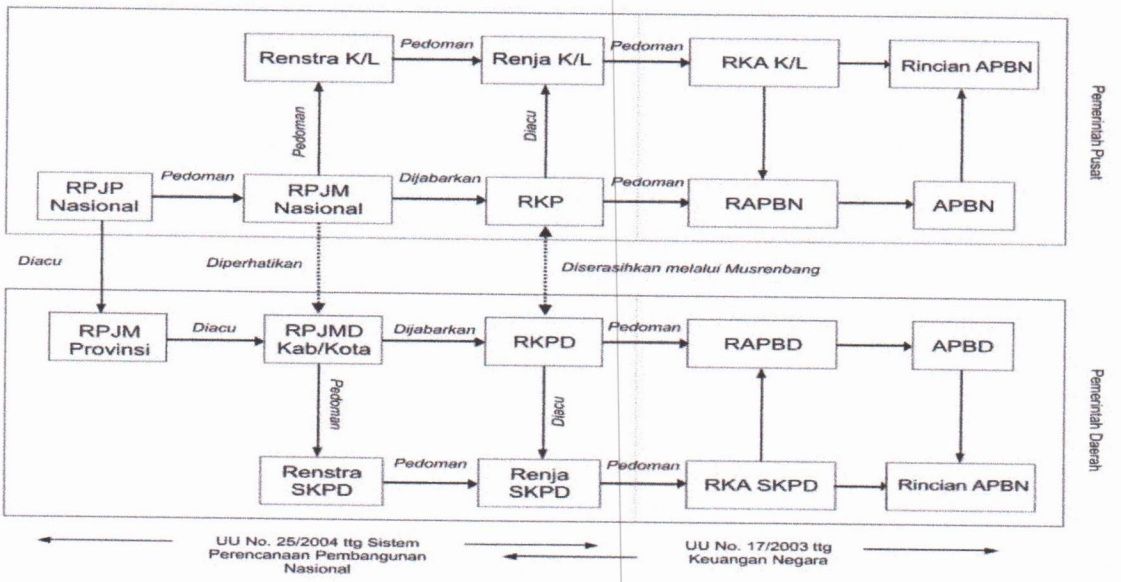
- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan OPD;
- Mereview hasil evaluasi pelaksaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
- Pembahasan forum OPD; dan Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

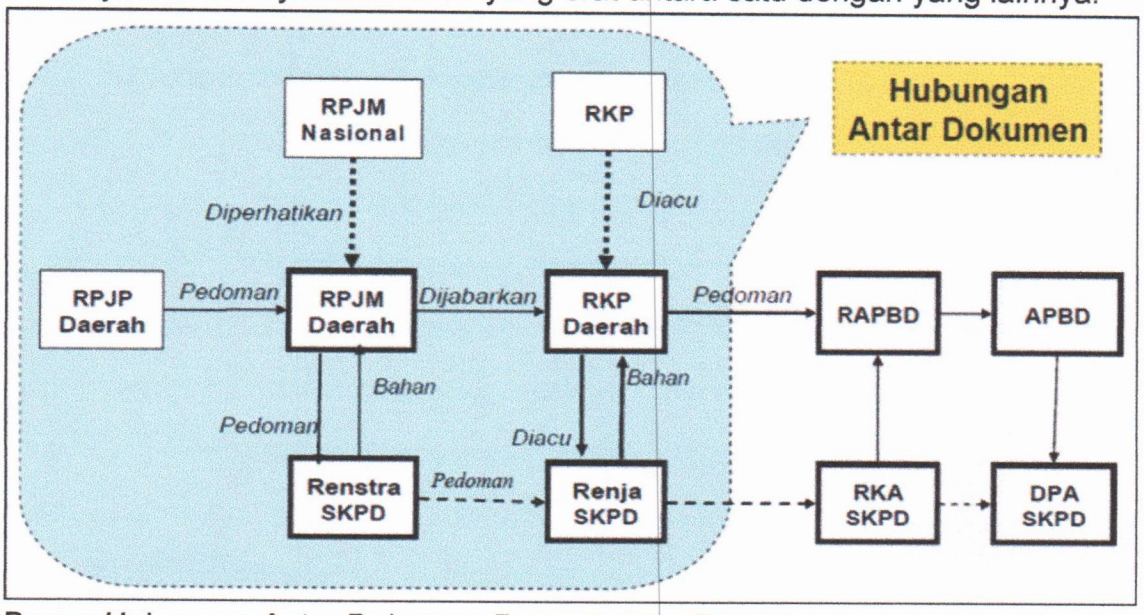
f. Penetapan Renja.

Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:




### 1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.




Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2025 SOPD Inspektorat sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender DI Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

33. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
41. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

42. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
43. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
44. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
46. 39. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nommor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
55. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
56. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
57. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
58. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
59. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
60. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 71 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Selatan.
61. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor5);

62. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarustamaan Gender;
63. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
66. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
67. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026;
68. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin;

## 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya Renja Inspektorat Kabupaten Tapin adalah untuk:

a. menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

b. bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan dari penyusunan Renja 2025, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Inspektorat;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Inspektorat;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SOPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja PD Inspektorat dan Kabupaten Tapin tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024

BAB III TUJUAN, SASARAN OPD

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi tentang: Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

# BAB II
# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SOPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja PD berdasarkan hasil Review atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya

## 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan renja PD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra PD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SOPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SOPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2=2025-2=2023) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:**

Nihil

**b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

**c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan:**

Nihil

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA**
**Renja SKPD Inspektorat Kabupaten Tapin**
**Triwulan IV Tahun 2023**

| No | Kode Anggaran | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (s/d) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (s/d) | | Prediksi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD sd Tahun 2023 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD sd Tahun 2023 | | Unit SKPD Penanggung jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 = 8+9+10+11 | | | 13 = 5/7 x 100 | | 14 = 6/7 | | | 15 = 14/7 x 100 | | 16 | 17 |
| | | | | | | | K | Rp | | K | Rp | | K | Rp | | K | Rp | | K | Rp | | K | Rp | | K | Rp | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | | | | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP minimal level 3 | 3 | Level | 12,614,573,163 | 3 | Level | 12,614,573,163 | | Level | 2,655,155,543 | | Level | 5,467,636,252 | | Level | 7,654,419,057 | 3 | Level | 11,534,465,857 | 3 | Level | 11,534,465,857 | 100,00 | 91,46 | 3 | Level | 11,534,465,857 | 100,00 | 91,46 | Sekr | |
| | | | | | | Persentase ASN dengan capaian kinerja >80% | 100 | % | | 100 | % | | | % | | | % | | | % | | 83,84 | % | | 83,84 | % | | 83,84 | % | | 83,84 | | Sekr | |
| | | | | | | Perencanaan Kinerja | 24 | Nilai | | | Nilai | | | Nilai | | | Nilai | | 23 | Nilai | | | Nilai | | 23 | Nilai | | | 23,00 | Nilai | | 95,83 | | Sekr | |
| | | | | | | Pengukuran Kinerja | 22 | Nilai | | | Nilai | | | Nilai | | | Nilai | | 21 | Nilai | | | Nilai | | 21 | Nilai | | | 21,00 | Nilai | | 95,45 | | Sekr | |
| | | | | | | Pelaporan Kinerja | 11 | Nilai | | | Nilai | | | Nilai | | | Nilai | | 11 | Nilai | | | Nilai | | 11 | Nilai | | | 11,00 | Nilai | | 100,00 | | Sekr | |
| | | | | | | Evaluasi Internal | 17 | Nilai | | | Nilai | | | Nilai | | | Nilai | | 17,50 | Nilai | | | Nilai | | 17,50 | Nilai | | | 17,50 | Nilai | | 102,94 | | Sekr | |
| 6 | 01 | 01 | 2,01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu | 100 | % | 1,060,870 | 100 | % | 0,565,950 | 100 | % | | 100 | % | 1,619,150 | 100 | % | 2,417,500 | 100 | % | 2,417,500 | 100,00 | 87,00 | 100 | % | 2,417,500 | 100,00 | 87,00 | Perencanaan | |
| 6 | 01 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan | 2 | Dok | 529,100 | 2 | Dok | 529,100 | 2 | Dok | | 2 | Dok | | 2 | Dok | 482,500 | 2 | Dok | 482,500 | 100,00 | 83,94 | 2 | Dok | 482,500 | 100,00 | 83,94 | Perencanaan | |
| 6 | 01 | 01 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA | Jumlah dokumen RKA | 1 | Dok | 539,100 | 1 | Dok | 539,100 | | Dok | | | Dok | | 1 | Dok | 460,600 | 1 | Dok | 460,600 | 100,00 | 85,46 | 1 | Dok | 460,600 | 100,00 | 85,46 | Perencanaan | |
| 6 | 01 | 01 | 2,01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA Perubahan | 1 | Dok | 539,100 | 1 | Dok | 539,100 | | Dok | | | Dok | | 1 | Dok | 456,100 | 1 | Dok | 456,100 | 100,00 | 84,61 | 1 | Dok | 456,100 | 100,00 | 84,61 | Perencanaan | |
| 6 | 01 | 01 | 2,01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA | 1 | Dok | 269,200 | 1 | Dok | 269,200 | | Dok | | | Dok | | 1 | Dok | 184,750 | 1 | Dok | 184,750 | 100,00 | 68,63 | 1 | Dok | 184,750 | 100,00 | 68,63 | Perencanaan | |
| 6 | 01 | 01 | 2,01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA Perubahan | 1 | Dok | 269,200 | 1 | Dok | 269,200 | | Dok | | | Dok | | 1 | Dok | 172,500 | 1 | Dok | 172,500 | 100,00 | 64,07 | 1 | Dok | 172,500 | 100,00 | 64,07 | Perencanaan | |
| 6 | 01 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja | 2 | Lap | 926,100 | 2 | Lap | 926,100 | 2 | Lap | | 2 | Lap | | 2 | Lap | 451,100 | 2 | Lap | 451,100 | 100,00 | 48,71 | 2 | Lap | 451,100 | 100,00 | 48,71 | Perencanaan | |
| 6 | 01 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja | 4 | Lap | 491,050 | 4 | Lap | 491,050 | 1 | Lap | | 2 | Lap | | 3 | Lap | 160,000 | 4 | Lap | 240,000 | 100,00 | 48,89 | 4 | Lap | 240,000 | 100,00 | 48,89 | Perencanaan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | | | | | | 100,00 | 67,90 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Sub Kegiatan | | | | | | ST | S | | |
| 6 | 01 | 01 | 2,02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | 100 | % | 9,289,626,427 | 100 | % | 9,289,626,427 | 100 | Bln | 2,322,406,607 | 100 | Bln | 4,644,813,214 | 100 | Bln | 6,966,219,821 | 100 | Bln | 7,566,697,370 | 100,00 | 81,46 | 100,00 | Bln | 7,566,697,370 | 100,00 | 81,46 | Adum | |
| 6 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 39 | Org | 8,220,112,017 | 39 | Org | 8,220,112,017 | 39 | Org | 2,279,278,710 | 39 | Org | 4,975,369,736 | 39 | Org | 6,526,161,006 | 39 | Org | 7,553,041,970 | 100,00 | 91,89 | 39,00 | Org | 7,553,041,970 | 100,00 | 91,89 | Adum | |
| 6 | 01 | 01 | 2,02 | 02 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SPPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 12 | Dok | 60,169,810 | 12 | Dok | 60,169,810 | 3 | Dok | 6,000,000 | 6 | Dok | 10,500,000 | 9 | Dok | 16,500,000 | 12 | Dok | 44,424,800 | 100,00 | 68,18 | 12,00 | Dok | 44,424,800 | 100,00 | 68,18 | Adum | |
| 6 | 01 | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan | 1 | Lap | 4,161,600 | 1 | Lap | 4,161,600 | 1 | Lap | | 1 | Lap | 2,609,000 | 1 | Lap | 4,144,500 | 1 | Lap | 4,144,500 | 100,00 | 99,11 | 1,00 | Lap | 4,144,500 | 100,00 | 99,11 | Adum | |
| 6 | 01 | 01 | 2,02 | 09 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen pelaporan prognosis keuangan | 1 | Dok | 4,161,600 | 1 | Dok | 4,161,600 | 1 | Dok | | 1 | Dok | | 1 | Dok | 4,075,100 | 1 | Dok | 4,075,100 | 100,00 | 97,96 | 1,00 | Dok | 4,075,100 | 100,00 | 97,96 | Adum | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | | | | | | 100,00 | 91,71 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Sub Kegiatan | | | | | | ST | ST | | |
| 6 | 01 | 01 | 2,04 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan dan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 | % | 1,653,984 | 100 | % | 1,653,984 | | % | | | % | | 100 | % | 1,710,000 | 100 | % | 1,710,000 | 100,00 | 91,44 | 100 | % | 1,710,000 | 100,00 | 91,44 | Adum | |
| 6 | 01 | 01 | 2,04 | 05 | Pelaporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | Lap | 1,869,984 | 1 | Lap | 1,869,984 | | Lap | | | Lap | | | Lap | | 1 | Lap | 1,710,000 | 100,00 | 91,44 | 1 | Lap | 1,710,000 | 100,00 | 91,44 | Adum | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | | | | | | 100,00 | 91,44 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Sub Kegiatan | | | | | | ST | ST | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu | 100 | % | 271,639,990 | 100 | % | 271,639,990 | 100 | % | 15,506,500 | 100 | % | 81,136,000 | 100 | % | 97,272,000 | 100 | % | 215,946,250 | 100 | % | 215,946,250 | 100.00 | 57.95 | 100 | Bln | 215,946,250 | 100.00 | 57.95 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | 39 | Dok | 65,628,180 | 39 | Dok | 65,628,180 | 39 | Dok | 7,200,000 | 39 | Dok | 14,405,000 | 39 | Dok | 28,700,000 | 39 | Dok | 51,406,150 | 39 | Dok | 51,406,150 | 100.00 | 78.33 | 39 | Dok | 51,406,150 | 100.00 | 78.33 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 39 | Org | 129,141,050 | 39 | Org | 129,141,050 | 39 | Org | 18,006,500 | 39 | Org | 47,436,000 | 39 | Org | 47,436,000 | 39 | Org | 81,959,700 | 39 | Org | 81,959,700 | 100.00 | 63.47 | 39 | Org | 81,959,700 | 100.00 | 63.47 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 39 | Org | 176,869,750 | 39 | Org | 176,869,750 | 39 | Org | 18,300,000 | 39 | Org | 18,300,000 | 39 | Org | 22,136,000 | 39 | Org | 81,980,400 | 39 | Org | 81,980,400 | 100.00 | 46.35 | 39 | Org | 81,980,400 | 100.00 | 46.35 | Adum |
| Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 57.95 | | | | 100.00 | 57.95 | |
| Predikat Kinerja Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | R | | | | ST | R | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran tepat waktu | 100 | % | 2,534,768,144 | 100 | % | 2,534,762,144 | 100 | % | 252,699,909 | 100 | % | 553,622,982 | 100 | % | 1,571,647,394 | 100 | % | 2,442,895,924 | 100 | % | 2,442,895,924 | 100.00 | 96.76 | 100.00 | % | 2,442,885,924 | 100.00 | 96.76 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 | Paket | 29,152,450 | 2 | Paket | 29,152,450 | | Paket | 1,503,000 | | Paket | 2,224,000 | 1 | Paket | 6,471,500 | 2 | Paket | 11,857,600 | 2 | Paket | 11,857,600 | 100.00 | 40.68 | 2 | Paket | 11,857,600 | 100.00 | 40.68 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | Paket | 112,447,290 | 12 | Paket | 112,447,290 | 3 | Paket | 27,426,437 | 6 | Paket | 29,526,437 | 9 | Paket | 36,222,392 | 12 | Paket | 90,227,950 | 12 | Paket | 90,227,950 | 100.00 | 80.24 | 12 | Paket | 90,227,950 | 100.00 | 80.24 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 12 | Paket | 7,728,614 | 12 | Paket | 7,728,814 | 3 | Paket | 7,352,000 | 6 | Paket | 7,352,000 | 9 | Paket | 7,352,000 | 12 | Paket | 7,722,000 | 12 | Paket | 7,722,000 | 100.00 | 99.91 | 12 | Paket | 7,722,000 | 100.00 | 99.91 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 | Paket | 160,933,090 | 12 | Paket | 160,933,090 | 3 | Paket | 30,876,395 | 6 | Paket | 43,945,595 | 9 | Paket | 75,695,425 | 12 | Paket | 148,777,750 | 12 | Paket | 148,777,750 | 100.00 | 92.45 | 12 | Paket | 148,777,750 | 100.00 | 92.45 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 | Paket | 54,025,390 | 12 | Paket | 54,025,390 | 3 | Paket | 6,522,250 | 6 | Paket | 10,643,300 | 9 | Paket | 19,184,700 | 12 | Paket | 53,940,524 | 12 | Paket | 53,940,524 | 100.00 | 99.84 | 12 | Paket | 53,940,824 | 100.00 | 99.84 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 | Lap | 24,258,320 | 12 | Lap | 24,258,320 | 3 | Lap | 4,880,500 | 6 | Lap | 9,802,500 | 9 | Lap | 15,143,240 | 12 | Lap | 24,107,440 | 12 | Lap | 24,107,440 | 100.00 | 99.38 | 12 | Lap | 24,107,440 | 100.00 | 99.38 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | Lap | 2,136,217,000 | 12 | Lap | 2,136,217,000 | 3 | Lap | 174,329,356 | 6 | Lap | 750,529,050 | 9 | Lap | 1,419,278,127 | 12 | Lap | 2,106,252,360 | 12 | Lap | 2,106,252,360 | 100.00 | 98.60 | 12 | Lap | 2,106,252,360 | 100.00 | 98.60 | Adum |
| Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 98.76 | | | | 100.00 | 98.76 | |
| Predikat Kinerja Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | | | | ST | ST | |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan BMD sesuai kebutuhan | 100 | % | 534,019,484 | 100 | % | 534,019,484 | | % | | 100 | % | 16,565,460 | 100 | % | 218,874,387.00 | 100 | % | 492,866,597 | 100 | % | 492,866,597.00 | 100.00 | 92.21 | 100 | % | 492,866,597.00 | 100.00 | 92.21 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 93 | Paket | 166,705,392 | 93 | Paket | 166,705,382 | | Paket | | | Paket | | 18 | Paket | 60,882,667.00 | 93 | Paket | 163,457,667 | 93 | Paket | 163,457,667 | 100.00 | 98.05 | 93 | Unit | 163,457,667,00 | 100.00 | 98,05 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 43 | Unit | 367,314,102 | 43 | Unit | 367,314,102 | | Unit | | 6 | Unit | 16,565,460 | 27 | Unit | 157,991,720.00 | 43 | Unit | 329,408,930 | 43 | Unit | 329,408,930 | 100.00 | 89.70 | 43 | Unit | 329,408,930,00 | 100.00 | 89,70 | Adum |
| Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 92.31 | | | | 100.00 | 92.31 | |
| Predikat Kinerja Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | | | | ST | ST | |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu | 100 | % | 180,159,440 | 100 | % | 180,159,440 | 100 | % | 34,051,740 | 100 | % | 61,948,971 | 100 | % | [illegible] | 100 | % | 142,517,463 | 100 | % | 142,517,463 | 100.00 | 79.11 | 100 | % | 142,517,463 | 100.00 | 79.11 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | Lap | 123,710,000 | 12 | Lap | 123,710,000 | 3 | Lap | 20,182,380 | 6 | Lap | 38,525,571 | 9 | Lap | 61,669,463 | 12 | Lap | 86,456,823 | 12 | Lap | 86,456,823 | 100.00 | 69.89 | 12 | Lap | 86,456,823 | 100.00 | 69.89 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Lap | 56,449,440 | 12 | Lap | 56,449,440 | 3 | Lap | 13,869,360 | 6 | Lap | 23,423,400 | 9 | Lap | 37,282,760 | 12 | Lap | 56,060,640 | 12 | Lap | 56,060,640 | 100.00 | 99.31 | 12 | Lap | 56,060,640 | 100.00 | 99.31 | Adum |
| Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 79.11 | | | | 100.00 | 79.11 | |
| Predikat Kinerja Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | T | | | | ST | T | |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase aset dalam kondisi baik | 100 | % | 704,927,154 | 100 | % | 704,927,154 | 90.13 | % | 37,628,655 | 90.13 | % | 68,235,091 | 90.13 | % | 112,347,195 | 97.77 | % | 620,944,553 | 97.77 | % | 620,944,553 | 97.77 | 88.09 | 97.77 | % | 620,944,553 | 97.77 | 88.09 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 | Unit | 83,275,216 | 1 | Unit | 83275216 | 1 | Unit | 11,119,280 | 1 | Unit | 20,297,650 | 1 | Unit | 36,896,855 | 1 | Unit | 63,862,161 | 1 | Unit | 63,862,161 | 100.00 | 76.69 | 12 | Unit | 63,862,161 | 12.00 | 76.69 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 | Unit | 141,677,996 | 10 | Unit | 141,677,996 | 3 | Unit | 16,560,255 | 6 | Unit | 30,219,541 | 9 | Unit | 40,307,741 | 10 | Unit | 114,245,312 | 15 | Unit | 114,245,312 | 100.00 | 80.64 | 10 | Unit | 114,245,312 | 10.00 | 80,64 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 80 | Unit | 58,540,000 | 80 | Unit | 56,540,000 | 20 | Unit | 6,466,200 | 30 | Unit | 14,158,700 | 60 | Unit | 19,026,700 | 80 | Unit | 54,430,347 | 80 | Unit | 54,430,347 | 100.00 | 96.27 | 80 | Unit | 54,430,347 | 80.00 | 96.27 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | 423,433,940 | 1 | Unit | 423,433,940 | 1 | Unit | 1,484,000 | 1 | Unit | 1,621,000 | 1 | Unit | 15,113,899 | 1 | Unit | 388,406,733 | 1 | Unit | 388,406,733 | 100.00 | 91.73 | 1 | Unit | 388,406,733 | 1.00 | 91,73 | Adum |
| Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 88.09 | | | | 100.00 | 88.09 | |
| Predikat Kinerja Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | T | | | | ST | T | |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.47 | 91.36 | | | | 99.47 | 91.36 | |
| Predikat Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | | | | ST | ST | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Nilai penjaminan kualitas kuantitas penyelenggaraan SPIP | 3 | Nilai | 4,129,903,000 | 3 | Nilai | 4,129,903,000 | | | 391,919,040 | | | 960,145,825 | 3,00 | Nilai | 1,689,616,420 | | | 2,804,171,405 | 3,00 | Nilai | 2,804,171,405 | 113,27 | 70,32 | 3,00 | Nilai | 2,804,171,405 | 113,27 | 70,32 | Iklan | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | | Pengawasan Penyelenggaran Internal | Rata-rata pencapaian yang diharapkan seluruh | 100 | % | 2,951,427,940 | 100 | % | 2,951,427,940 | 100 | % | 391,919,040 | 100,00 | % | 949,969,000 | 100 | % | 1,673,534,900 | 100 | % | 2,917,349,102 | 100,00 | % | 2,917,349,102 | 100,00 | 70,51 | 100,00 | % | 2,917,349,102 | 100,00 | 70,51 | Iklan | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 23 | Lap | 768,864,000 | 23 | Lap | 768,864,000 | | Lap | 21,800,000 | 5 | Lap | 79,219,000 | 18 | Lap | 341,640,000 | 23 | Lap | 520,969,000 | 22 | Lap | 520,969,000 | 100,00 | 67,92 | 22 | Lap | 520,969,000 | 100,00 | 67,92 | Iklan | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 15 | Lap | 719,980,800 | 15 | Lap | 719,980,800 | 1 | Lap | 113,640,000 | 6 | Lap | 221,549,000 | 12 | Lap | 289,540,000 | 15 | Lap | 606,020,000 | 15 | Lap | 606,020,000 | 100,00 | 84,17 | 15 | Lap | 606,020,000 | 100,00 | 84,17 | Iklan | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 16 | Lap | 398,472,480 | 16 | Lap | 398,472,480 | 1 | Lap | 44,230,000 | 3 | Lap | 64,019,000 | 9 | Lap | 118,130,000 | 16 | Lap | 216,110,000 | 16 | Lap | 216,110,000 | 100,00 | 55,53 | 16 | Lap | 216,110,000 | 100,00 | 55,53 | Iklan | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 2 | Lap | 78,199,200 | 2 | Lap | 78,199,200 | | Lap | | 1 | Lap | 27,479,700 | 1 | Lap | 40,949,700 | 2 | Lap | 68,398,700 | 2 | Lap | 68,398,700 | 100,00 | 76,64 | 2 | Lap | 68,398,700 | 100,00 | 76,64 | Iklan | |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | 05 | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 12 | Lap | 519,392,200 | 12 | Lap | 519,392,200 | 3 | Lap | 81,980,000 | 6 | Lap | 184,289,600 | 9 | Lap | 239,299,600 | 12 | Lap | 410,030,905 | 12 | Lap | 410,030,905 | 100,00 | 78,95 | 12 | Lap | 410,030,905 | 100,00 | 78,95 | Iklan | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 48 | Dok | 360,729,020 | 48 | Dok | 360,729,020 | 10 | Dok | 16,200,000 | 15 | Dok | 52,069,000 | 30 | Dok | 101,877,000 | 48 | Dok | 206,267,500 | 48 | Dok | 206,267,500 | 100,00 | 57,18 | 48 | Dok | 206,267,500 | 100,00 | 57,18 | Evlap | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | | | | | | 100,00 | 70,51 | | | | | | 100,00 | 70,51 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Sub Kegiatan | | | | | | ST | S | | | | | | ST | S | | |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaran Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Penyelesaian Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu | 100 | % | 1,288,271,320 | 100 | % | 1,288,271,320 | 100 | % | 114,206,840 | 100 | % | 311,176,825 | 100 | % | 485,803,120 | 100 | % | 911,187,201 | 100 | % | 911,187,201 | 100,00 | 49,00 | 100,00 | % | 911,187,201 | 100,00 | 49,00 | Iklan | |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 1 | Lap | 246,477,650 | 1 | Lap | 246,477,650 | | Lap | | 1 | Lap | 37,269,000 | 1 | Lap | 37,500,000 | 1 | Lap | 46,496,000 | 1 | Lap | 46,496,000 | 100,00 | 18,86 | 1 | Lap | 46,496,000 | 100,00 | 18,86 | Iklan | |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 4 | Lap | 1,021,797,670 | 4 | Lap | 1,021,797,670 | 1 | Lap | 114,206,840 | 2 | Lap | 274,206,520 | 3 | Lap | 428,482,120 | 4 | Lap | 840,027,301 | 4 | Lap | 840,027,301 | 100,00 | 82,21 | 4 | Lap | 840,027,301 | 100,00 | 82,21 | Iklan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | | | | | | 100,00 | 68,00 | | | | | | 100,00 | 68,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Sub Kegiatan | | | | | | ST | S | | | | | | ST | S | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) | | | | | | 100,00 | 70,32 | | | | | | 100,00 | 70,32 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Kegiatan | | | | | | ST | S | | | | | | ST | S | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 03 | | | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil** | **100** | **%** | **1.101.364.203** | **100** | **%** | **1.101.364.203** | | **%** | **203.000** | **98,11** | **%** | **62.709.000** | | **%** | **172.834.500** | | | **424.270.625** | **98,11** | **%** | **424.270.625** | **98,11** | **38,52** | **98,11** | **%** | **424.270.625** | **98,11** | **38,52** | **Irban** | |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang sesuai dengan mekanisme [illegible] | 100 | % | 28.290.873 | 100 | % | 28.290.873 | | % | | | % | | | % | | 100 | % | 8.005.750 | 100 | % | 8.005.750 | 100,00 | 28,30 | 100 | % | 8.005.750 | 100,00 | 28,30 | Sekretaris | |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 1 | Rekomendasi | 26,777,008 | 1 | Rekomendasi | 26,777,008 | | Rekomendasi | | | Rekomendasi | | | Rekomendasi | | 1 | Rekomendasi | 6,550,000 | 1 | Rekomendasi | 6,550,000 | 100,00 | 24,46 | 1 | Rekomendasi | 6,550,000 | 100,00 | 24,46 | Evlap | |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 1 | Rekomendasi | 1,513,865 | 1 | Rekomendasi | 1,513,865 | | Rekomendasi | | | Rekomendasi | | | Rekomendasi | | 1 | Rekomendasi | 1,455,750 | 1 | Rekomendasi | 1,455,750 | 100,00 | 96,16 | 1 | Rekomendasi | 1,455,750 | 100,00 | 96,16 | TU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | 100,00 | 28,20 | | | | 100,00 | 28,30 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Sub Kegiatan | ST | SR | | | | ST | SR | | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | | Pendampingan dan Asistensi | Jumlah SKPD yang mempertahankan predikat WBK hingga TPN | 3 | SKPD | 1.053.073.330 | 3 | SKPD | 1.053.073.330 | | SKPD | 203.000 | | SKPD | 62.709.000 | | SKPD | 172.834.500 | 3 | SKPD | 416.264.875 | 100 | % | 416.264.875 | 100,00 | 39,79 | 100 | % | 416.264.875 | 100 | 39,79 | Irban | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 13 | Perangkat Daerah | 179,563,560 | 13 | Perangkat Daerah | 179,563,560 | | Perangkat Daerah | | | Perangkat Daerah | | | Perangkat Daerah | | 13 | Perangkat Daerah | 5,750,000 | 13 | Perangkat Daerah | 5,750,000 | 100,00 | 3,20 | | Perangkat Daerah | 5,750,000 | 100,00 | 3,20 | Irban | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 24 | Perangkat Daerah | 165,905,540 | 24 | Perangkat Daerah | 165,905,540 | | Perangkat Daerah | | | Perangkat Daerah | | | Perangkat Daerah | | 24 | Perangkat Daerah | 37,275,000 | 24 | Perangkat Daerah | 37,275,000 | 100,00 | 20,05 | 24 | Perangkat Daerah | 37,275,000 | 100,00 | 20,05 | Irban | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 5 | Keg | 592,030,850 | 5 | Keg | 592,030,850 | 1 | Keg | 203,000 | 2 | Keg | 62,709,000 | 3 | Keg | 172,834,500 | 5 | Keg | 370,725,875 | 5 | Keg | 370,725,875 | 100,00 | 62,62 | 5 | Keg | 370,725,875 | 100,00 | 62,62 | Irban | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 3 | Perangkat Daerah | 115,573,380 | 3 | Perangkat Daerah | 115,573,380 | | Perangkat Daerah | | | Perangkat Daerah | | | Perangkat Daerah | | 3 | Perangkat Daerah | 2,514,000 | 3 | Perangkat Daerah | 2,514,000 | 100,00 | 2,18 | | Perangkat Daerah | 2,514,000 | | 2,18 | Irban | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | 100,00 | 39,79 | | | | 100,00 | 39,79 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Sub Kegiatan | ST | SR | | | | ST | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) | 100,00 | 38,52 | | | | 100,00 | 38,52 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Kegiatan | ST | SR | | | | ST | SR | | |
| | | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | 17.845.840.425 | | | 3.047.276.583 | | | 6.460.485.072 | | | 9.515.568.077 | | | 14.652.807.888 | | | 14.652.807.888 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3) | 94,93 | 83,23 | | | | 94,93 | 83,23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3) | ST | T | | | | ST | T | | |

**FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA**
**Renja SKPD Inspektorat Kabupaten Tapin**
**Triwulan II Tahun 2024**

| No | Kode Anggaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 | | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 | | Unit SKPD Penanggung jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | | 13 = 12/7 x 100 | | 14 = 5+12 | | | 15 = 14/5 x 100 | | 16 | 17 |
| | | | | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | | K | | Rp | K | | | |
| 6 | | URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Level Kapabilitas APIP | 3 | Level | 11.923.126.182 | 3 | Level | 11.923.126.182 | | Level | 2.493.002.000 | | | 6.268.039.486 | | | | | | | Level | 8.268.039.486 | 0,00 | 52,57 | 0,00 | Level | 6.268.039.486 | 0,00 | 52,57 | Sekr | |
| | | | | Indeks kepuasan pelayanan sekretariat | 92 | Nilai | | 92 | Nilai | | | Nilai | | | | | | | | | | | Nilai | | 0,00 | | | Nilai | | 0,00 | | Sekr | |
| | | | | Persentase APIP yang sesuai kompetensi | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | | | | | | | | | 100 | % | | 100,00 | | 100 | % | | 100,00 | | Sekr | |
| | | | | Nilai SAKIP Inspektorat | BB | Kategori | | BB | Kategori | | A | Kategori | | | | | | | | | | A | Kategori | | 100,00 | | A | Kategori | | 100,00 | | Sekr | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu | 100 | % | 4.217.600 | 100 | % | 4.217.600 | 100 | % | | | | | | | | | | 100,00 | % | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | % | | 100,00 | | Perencanaan | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan | 2 | Dok | 656.000 | 2 | Dok | 656.000 | | Dok | | | | | | | | | | 0,00 | Dok | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dok | - | 0,00 | - | Perencanaan | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA | 1 | Dok | 656.000 | 1 | Dok | 656.000 | | Dok | | | | | | | | | | 0,00 | Dok | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dok | - | 0,00 | - | Perencanaan | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA Perubahan | 1 | Dok | 656.000 | 1 | Dok | 656.000 | | Dok | | | | | | | | | | 0,00 | Dok | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dok | - | 0,00 | - | Perencanaan | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA | 1 | Dok | 396.000 | 1 | Dok | 396.000 | | Dok | | | | | | | | | | 0,00 | Dok | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dok | - | 0,00 | - | Perencanaan | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA Perubahan | 1 | Dok | 396.000 | 1 | Dok | 396.000 | | Dok | | | | | | | | | | 0,00 | Dok | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dok | - | 0,00 | - | Perencanaan | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja | 2 | Lap | 656.000 | 2 | Lap | 656.000 | 1 | Lap | | | | | | | | | | 1,00 | Lap | - | 50,00 | 0,00 | 1,00 | Lap | - | 50,00 | - | Perencanaan | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja | 4 | Lap | 596.000 | 4 | Lap | 596.000 | 1 | Lap | | | 1 | Lap | | | | | | 2,00 | Lap | - | 50,00 | 0,00 | 2,00 | Lap | - | 50,00 | - | Perencanaan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | | | | 14,29 | 0,00 | | | | 14,29 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Sub Kegiatan | | | | SR | SR | | | | SR | SR | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | 100 | % | 8.949.496.291 | 100 | % | 8.949.496.291 | 100 | % | 2.153.946.307 | 100 | % | 4.955.305.879 | | | | | | 100 | Bln | 4.955.305.879 | 100,00 | 56,14 | 100,00 | Bln | 4.955.305.879 | 100,00 | 56,14 | Adum | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 38 | Org | 8.826.514.281 | 38 | Org | 8.826.514.281 | 38 | Org | 2.153.946.307 | 38 | Org | 4.955.305.879 | | | | | | 38 | Org | 4.955.305.879 | 100,00 | 56,14 | 38,00 | Org | 4.955.305.879 | 100,00 | 56,14 | Adum | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 12 | Dok | 109.930.000 | 12 | Dok | 109.930.000 | 3 | Dok | 15.300.000 | 6 | Dok | 37.500.000 | | | | | | 6 | Dok | 37.500.000 | 50,00 | 34,11 | 6,00 | Dok | 37.500.000 | 50,00 | 34,11 | Adum | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan | 1 | Lap | 4.995.000 | 1 | Lap | 4.995.000 | 1 | Lap | | | | | | | | | | 1 | Lap | | 100,00 | 0,00 | 1,00 | Lap | | 100,00 | 0,00 | Adum | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 08 Pengelolaan dan Penyelesaian Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 | Dok | 3.262.000 | 1 | Dok | 3.262.000 | | Dok | | | | | | | | | | 0 | Dok | | - | 0,00 | 0,00 | Dok | | 0,00 | 0,00 | Adum | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen pelaporan prognosis keuangan | 1 | Dok | 4.795.000 | 1 | Dok | 4.795.000 | | Dok | | | | | | | | | | 0 | Dok | | - | 0,00 | 0,00 | Dok | | 0,00 | 0,00 | Adum | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | | | | 62,50 | 56,79 | | | | 62,50 | 56,79 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Sub Kegiatan | | | | R | R | | | | R | R | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase pemeliharaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 | % | 2.235.200 | 100 | % | 2.235.200 | | % | | 100 | % | 445.000 | | | | | | 100 | % | 445.000 | 100,00 | 19,91 | 100 | % | 445.000 | 100,00 | 19,91 | Adum | |
| 6 | 01 | 01 | 2.03 | 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | Lap | 2.235.200 | 1 | Lap | 2.235.200 | | Lap | | 1 | Lap | 445.000 | | | | | | 1 | Lap | 445.000 | 100,00 | 19,91 | 1 | Lap | 445.000 | 100,00 | 19,91 | Adum | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | | | | 100,00 | 19,91 | | | | 100,00 | 19,91 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Sub Kegiatan | | | | ST | SR | | | | ST | SR | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu | 100 | % | 595.468.340 | 100 | % | 595.468.340 | 100 | % | 54.850.000 | | | 177.975.000 | | | | | | | 100 | % | 177.975.000 | 100,00 | 30,40 | 100 | Bln | 177.975.000 | 100,00 | 30,40 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 38 | Paket | 29.711.500 | 38 | Paket | 29.711.500 | | Paket | | | | | | | | | | | | Paket | - | 0,00 | 0,00 | 0 | Paket | - | 0,00 | 0,00 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | 38 | Dok | 87.278.400 | 38 | Dok | 87.278.400 | 38 | Dok | 13.800.000 | 38 | Dok | 41.400.000 | | | | | | | 38 | Dok | 41.400.000 | 100,00 | 47,43 | 38 | Dok | 41.400.000 | 100,00 | 47,43 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 38 | Org | 196.332.200 | 38 | Org | 196.332.200 | 7 | Org | 17.800.000 | 12 | Org | 63.975.000 | | | | | | | 12 | Org | 63.975.000 | 31,58 | 32,59 | 12 | Org | 63.975.000 | 31,58 | 32,59 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 38 | Org | 272.146.240 | 38 | Org | 272.146.240 | 5 | Org | 23.250.000 | 31 | Org | 72.600.000 | | | | | | | 31 | Org | 72.600.000 | 81,58 | 26,68 | 31 | Org | 72.600.000 | 81,58 | 26,68 | Adum |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | 53,29 | 30,40 | | | | 53,29 | 30,40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Sub Kegiatan | R | SR | | | | R | SR | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran tepat waktu | 100 | % | 1.790.218.600 | 100 | % | 1.790.218.600 | 100 | % | 213.624.991 | 100 | % | 925.836.259 | | | | | | | 100 | % | 925.836.259,00 | 100,00 | 51,72 | 100,00 | % | 925.836.259 | 100,00 | 51,72 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 | Paket | 39.056.100 | 2 | Paket | 39.056.100 | 1 | Paket | 661.000 | | Paket | 1.453.500 | | | | | | | 1 | Paket | 1.453.500 | 50,00 | 3,72 | 1 | Paket | 1.453.500 | 50,00 | 3,72 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | Paket | 105.440.100 | 12 | Paket | 105.440.100 | 3 | Paket | 1.000.000 | 6 | Paket | 17.369.887 | | | | | | | 6 | Paket | 17.369.887 | 50,00 | 16,47 | 6 | Paket | 17.369.887 | 50,00 | 16,47 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 12 | Paket | 9.042.800 | 12 | Paket | 9.042.800 | 3 | Paket | 433.620 | 6 | Paket | 4.108.000 | | | | | | | 6 | Paket | 4.108.000 | 50,00 | 45,43 | 6 | Paket | 4.108.000 | 50,00 | 45,43 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 | Paket | 214.190.600 | 12 | Paket | 214.190.600 | 3 | Paket | 28.683.235 | 6 | Paket | 67.149.435 | | | | | | | 6 | Paket | 67.149.435 | 50,00 | 31,35 | 6 | Paket | 67.149.435 | 50,00 | 31,35 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 | Paket | 57.209.000 | 12 | Paket | 57.209.000 | 3 | Paket | 2.159.500 | 6 | Paket | 16.843.900 | | | | | | | 6 | Paket | 16.843.900 | 50,00 | 29,44 | 6 | Paket | 16.843.900 | 50,00 | 29,44 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 | Lap | 44.540.000 | 12 | Lap | 44.540.000 | 3 | Lap | 5.545.200 | 6 | Lap | 13.708.900 | | | | | | | 6 | Lap | 13.708.900 | 50,00 | 30,78 | 6 | Lap | 13.708.900 | 50,00 | 30,78 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | Lap | 1.320.740.000 | 12 | Lap | 1.320.740.000 | 3 | Lap | 175.142.436 | 6 | Lap | 805.202.637 | | | | | | | 6 | Lap | 805.202.637 | 50,00 | 60,97 | 6 | Lap | 805.202.637 | 50,00 | 60,97 | Adum |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | 50,00 | 51,72 | | | | 50,00 | 51,72 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Sub Kegiatan | SR | R | | | | SR | R | |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan BMD sesuai kebutuhan | 100 | % | - | 100 | % | | | % | | | | | | | | | | | 0 | % | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0 | % | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | | Paket | | 0 | Paket | - | | Paket | | | | | | | | | | | | Paket | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Unit | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya | | Unit | | 0 | Unit | - | | Unit | | | | | | | | | | | | Unit | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Unit | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | Adum |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | 0,00 | #DIV/0! | | | | 0,00 | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Sub Kegiatan | SR | #DIV/0! | | | | SR | #DIV/0! | |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu | 100 | % | 272.888.460 | 100 | % | 272.888.460 | 100 | % | 30.489.283 | 100 | % | 72.618.028 | | | | | | | 100 | % | 72.618.028 | 100,00 | 26,61 | 100 | % | 72.618.028 | 100,00 | 26,61 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | Lap | 193.816.960 | 12 | Lap | 193.816.960 | 3 | Lap | 21.061.603 | 6 | Lap | 44.364.148 | | | | | | | 6 | Lap | 44.364.148 | 50,00 | 22,89 | 6 | Lap | 44.364.148 | 50,00 | 22,89 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Lap | 79.071.500 | 12 | Lap | 79.071.500 | 3 | Lap | 9.427.680 | 6 | Lap | 28.253.880 | | | | | | | 6 | Lap | 28.253.880 | 50,00 | 35,73 | 6 | Lap | 28.253.880 | 50,00 | 35,73 | Adum |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | 50,00 | 26,61 | | | | 50,00 | 26,61 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Sub Kegiatan | SR | SR | | | | SR | SR | |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase aset dalam kondisi baik | 100 | % | 318.607.301 | 100 | % | 318.607.301 | 90,13 | % | 24.791.227 | 90,13 | % | 98.359.320 | | | | | | | 90,13 | % | 98.359.320 | 90,13 | 30,87 | 90,13 | % | 98.359.320 | 90,13 | 30,87 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 | Unit | 96.089.550 | 1 | Unit | 96.089.550 | 1 | Unit | 9.364.633 | 1 | Unit | 33.131.463 | | | | | | | 1 | Unit | 33.131.463 | 100,00 | 34,48 | 12 | Unit | 33.131.463 | 12,00 | 34,48 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 | Unit | 163.829.600 | 10 | Unit | 163.829.600 | 3 | Unit | 10.176.924 | 6 | Unit | 45.619.407 | | | | | | | 6 | Unit | 45.619.407 | 60,00 | 27,85 | 6 | Unit | 45.619.407 | 6,00 | 27,85 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 80 | Unit | 35.769.651 | 80 | Unit | 35.769.651 | 20 | Unit | 4.139.670 | 40 | Unit | 17.979.450 | | | | | | | 40 | Unit | 17.979.450 | 50,00 | 50,26 | 40 | Unit | 17.979.450 | 40,00 | 50,26 | Adum |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | 22.918.500 | 1 | Unit | 22.918.500 | 1 | Unit | 1.110.000 | 1 | Unit | 1.629.000 | | | | | | | 1 | Unit | 1.629.000 | 100,00 | 7,11 | 1 | Unit | 1.629.000 | 1,00 | 7,11 | Adum |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | 77,50 | 30,87 | | | | 77,50 | 30,87 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Sub Kegiatan | T | SR | | | | T | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) | 98,59 | 52,57 | | | | 98,59 | 52,57 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Kegiatan | ST | R | | | | ST | R | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Indeks Manajemen Risiko | 3 | Level | 3.474.478.470 | 3 | Level | 3.474.478.470 | | | 269.730.000 | | | 1.066.549.600 | | | | | | | 0 | 0 | 269.730.000 | 77.77 | 30,70 | 0 | 0 | 269.730.000 | 77.77 | 30,70 | Irban | |
| | | | | | | Persentase IKK sesuai pedoman | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | | | | | | | | | | 100 | % | | 100,00 | | 100 | % | | 100,00 | | Irban | |
| | | | | | | Persentase predikat sakip SKPD minimal BB | 100 | % | | 100 | % | | 97,77 | % | | | | | | | | | | | 97,77 | % | | 97,77 | | 97,77 | % | | 97,77 | | Irban | |
| | | | | | | Persentase SKPD yang tidak mendapatkan temuan berulang dari BPK RI | 100 | % | | 100 | % | | | % | | 96,56 | % | | | | | | | | 96,56 | % | | 96,56 | | | % | | 96,56 | | Irban | |
| | | | | | | Persentase kematangan manajemen risiko SKPD Minimal Level 3 | 100 | % | | 100 | % | | | % | | | | | | | | | | | | % | | | | | % | | | | Irban | |
| | | | | | | Persentase efektifitas penanganan risiko SKPD | 100 | % | | 100 | % | | | % | | 100 | % | | | | | | | | 100 | % | | 100,00 | | | % | | 100,00 | | Irban | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti | 100 | % | 2.509.242.540 | 100 | % | 2.509.242.540 | 73,53 | % | 132.460.000 | 77,55 | % | 727.030.000 | | | | | | | 77,56 | % | 727.030.000 | 77,56 | 28,97 | 77,56 | % | 727.030.000 | 77,56 | 28,97 | Irban | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 82 | Lap | 896.222.060 | 82 | Lap | 896.222.060 | 3 | Lap | 14.400.000 | 13 | Lap | 243.830.000 | | | | | | | 13 | Lap | 243.830.000 | 15,85 | 27,21 | 3 | Lap | 243.830.000 | 15,85 | 27,21 | Irban | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 40 | Lap | 489.359.350 | 40 | Lap | 489.359.350 | 6 | Lap | 18.220.000 | 14 | Lap | 129.480.000 | | | | | | | 14 | Lap | 129.480.000 | 35,00 | 26,46 | 14 | Lap | 129.480.000 | 35,00 | 26,46 | Irban | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 47 | Lap | 256.781.830 | 47 | Lap | 256.781.830 | 8 | Lap | | 8 | Lap | 92.990.000 | | | | | | | 8 | Lap | 92.990.000 | 17,02 | 36,21 | 8 | Lap | 92.990.000 | 17,02 | 36,21 | Irban | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 2 | Lap | 34.760.280 | 2 | Lap | 34.760.280 | | Lap | | 1 | Lap | 6.000.000 | | | | | | | 1 | Lap | 6.000.000 | 50,00 | 17,26 | 1 | Lap | 6.000.000 | 50,00 | 17,26 | Irban | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 32 | Lap | 456.453.690 | 32 | Lap | 456.453.690 | 14 | Lap | 89.040.000 | 14 | Lap | 161.455.000 | | | | | | | 14 | Lap | 161.455.000 | 43,75 | 35,37 | 14 | Lap | 161.455.000 | 43,75 | 35,37 | Irban | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 48 | Dok | 375.665.330 | 48 | Dok | 375.665.330 | 19 | Dok | 10.800.000 | 40 | Dok | 93.275.000 | | | | | | | 40 | Dok | 93.275.000 | 83,33 | 24,83 | 40 | Dok | 93.275.000 | 83,33 | 24,83 | Evlap | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | 40,83 | 28,97 | | | | 40,83 | 28,97 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Sub Kegiatan | SR | SR | | | | SR | SR | | |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu | 100 | % | 965.235.930 | 100 | % | 965.235.930 | 100 | % | 137.270.000 | 100 | % | 339.519.600 | | | | | | | 100 | % | 339.519.600 | 100,00 | 35,17 | 100,00 | % | 339.519.600 | 100,00 | 35,17 | Irban | |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 1 | Lap | 185.981.930 | 1 | Lap | 185.981.930 | | Lap | | 1 | Lap | 6.429.600 | | | | | | | 1 | Lap | 6.429.600 | 100,00 | 3,46 | | Lap | 6.429.600 | 100,00 | 3,46 | Irban | |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 16 | Lap | 779.254.000 | 16 | Lap | 779.254.000 | 1 | Lap | 137.270.000 | 11 | Lap | 333.090.000 | | | | | | | 11 | Lap | 333.090.000 | 68,75 | 42,74 | 11 | Lap | 333.090.000 | 68,75 | 42,74 | Irban | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | 84,38 | 35,17 | | | | 84,38 | 35,17 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Sub Kegiatan | T | SR | | | | T | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) | 86,66 | 30,70 | | | | 86,66 | 30,70 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Kegiatan | T | SR | | | | T | SR | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 03 | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | 3 | Level | 643.882.930 | 3 | Level | 643.882.930 | | Level | 456.000 | | | 64.888.500 | | | | | | | | Level | 64.888.500 | 0,00 | 10,08 | 0 | Level | 64.888.500 | 0,00 | 10,08 | Irban | |
| | | | | | | Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil | 100 | % | | 100 | % | | | % | | 68,88 | % | | | | | | | | 68,88 | % | | 68,88 | | 68,88 | % | | 68,88 | | Irban | |
| | | | | | | Persentase SKPD yang telah menerpakan mitigasi risiko fraud | 100 | % | | 100 | % | | | % | | | | | | | | | | | | % | | | | | % | | | | Irban | |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum | 100 | % | 29.446.770 | 100 | % | 29.446.770 | | % | | | | | | | | | | | | Level | - | | 0,00 | 0 | Level | - | 0,00 | 0,00 | Sekretaris | |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 1 | Rekomendasi | 27.246.020 | 1 | Rekomendasi | 27.246.020 | | Rekomendasi | | | | | | | | | | | | Rekomendasi | - | 0,00 | 0,00 | 0 | Rekomendasi | - | 0,00 | 0,00 | Evlap | |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 1 | Rekomendasi | 2.200.750 | 1 | Rekomendasi | 2.200.750 | | Rekomendasi | | | | | | | | | | | | Rekomendasi | - | | 0,00 | 0 | Rekomendasi | - | 0,00 | 0,00 | TU | |
| Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Predikat Kinerja Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | SR | SR | | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | | Pendampingan dan Asistensi | Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi yang telah ditindaklanjuti | 100 | % | 614.436.150 | 100 | % | 614.436.150 | | % | 456.000 | 100 | % | 64.038.500 | | | | | | | 100 | % | 64.888.500 | 100,00 | 10,56 | 100 | % | 64.888.500 | 100 | 10,56 | Irban | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 53 | Perangkat Daerah | 60.529.060 | 53 | Perangkat Daerah | 60.529.060 | | Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah | - | | 0,00 | | Perangkat Daerah | 0 | 100,00 | 0,00 | Irban | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 53 | Perangkat Daerah | 103.358.820 | 53 | Perangkat Daerah | 103.358.820 | | Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Perangkat Daerah | 0 | 0,00 | 0,00 | Irban | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 5 | Keg | 437.356.080 | 5 | Keg | 437.356.080 | 1 | Keg | 456.000 | 2 | Keg | 60.348.000 | | | | | | | 2 | Keg | 60.348.000 | 40,00 | 13,80 | 2 | Keg | 60.348.000 | 40,00 | 13,80 | Irban | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 53 | Perangkat Daerah | 13.192.200 | 53 | Perangkat Daerah | 13.192.200 | | Perangkat Daerah | | 6 | Perangkat Daerah | 4.540.500 | | | | | | | 6 | Perangkat Daerah | 4.540.500 | 11,32 | 34,42 | | Perangkat Daerah | | | | Irban | |
| Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,11 | 12,05 | | | | 17,11 | 12,05 | | |
| Predikat Kinerja Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | SR | SR | | |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,00 | 10,08 | | | | 50,00 | 10,08 | | |
| Predikat Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | SR | SR | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | 16.041.487.582 | | | 2.763.188.008 | | | 7.399.477.586 | | | - | | | - | | | 7.399.032.586 | | | | | | | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66,66 | 46,12 | | | | 66,66 | 46,12 | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | SR | | | | S | SR | | |

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD Inspektorat berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan SOPD Inspektorat. Keberhasilan kinerja SOPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan.Hasil keberhasilan kinerja pelayanan SOPD Inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel T-C.30

## Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Inspektorat Kabupaten Tapin

| NO | INDIKATOR | TARGET | | | | REALISASI CAPAIAN | | PROYEKSI | | CATATAN ANALISIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Level Kapabilitas APIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target |
| 2 | Indeks Manajemen Risiko | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,738 | 3 | 3 | 3 | Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target |
| 3 | Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,900 | 3 | 3 | 3 | Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target |
| 4 | Nilai SAKIP Inspektorat | 72 | 73 | 74 | 75 | 72,7 | 73 | 74 | 75 | Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target |
| 5 | Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat | 85 | 86 | 87 | 88 | 53 | 86 | 87 | 88 | Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target |

Indikator Kinerja Utama Inspektorat

| NO. | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR KINERJA | FORM PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Intern Instansi Pemerintah** | **Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP** | **Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP** | **LHP Evaluasi SPIP oleh BPKP** | **Inspektur** |
| | Meningkatnya Kapabilitas APIP | Kapabilitas APIP | Hasil Penilaian Kapabiltas APIP oleh BPKP | LHP Evaluasi Kapabilitas APIP oleh BPKP | Inspektur |
| | Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan | Indeks Manajemen Risiko | Hasil Indeks Penerapan Manajemen Risiko oleh BPKP | LHP Evaluasi SPIP oleh BPKP | Inspektur |
| | Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi | Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | Hasil Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) oleh BPKP | LHP Evaluasi SPIP oleh BPKP | Inspektur |
| | | | | | |
| **2.** | **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat** | **Nilai SAKIP Inspektorat** | **Nilai SAKIP Inspektorat oleh APIP** | **LHE SAKIP oleh APIP** | **Inspektur** |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat | Nilai SAKIP Inspektorat | Nilai SAKIP Inspektorat oleh APIP | LHE SAKIP oleh APIP | Inspektur |
| 3. | **Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat** | **Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat** | **Hasil Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat** | **Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat dari BKD** | **Inspektur** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat | Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat | Hasil Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat | Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat dari BKD | Inspektur |

Capaian sasaran strategis Inspektorat Tahun 2023:

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya kapabilitas APIP | Level Kapabilitas APIP | 3,000 | 3,000 | 100% |
| | Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan | Indeks Manajemen Risiko | 3,000 | 2,738 | 91,26% |
| | Meningkatnya efektifitas pengendalian korupsi | Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | 3,000 | 2,900 | 96,66% |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat | Nilai SAKIP Inspektorat | 72 | 72,7 | 100,97% |
| | Meningkatnya profesionalisme ASN Inspektorat | Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat | 85 | 53 | 62,35% |
| **Rata-rata capaian sasaran strategis** | | | | | **90.24%** |

## 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Inspektorat sebagai berikut:

1. Belum adanya keterkaitan dan konsistensi kebijakan perencanaan daerah dengan penganggaran daerah;
2. Belum terintegrasinya dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan Kabupaten Tapin;
3. Belum terintegritasnya perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum mengacu kepada dokumen perencanaan;
4. Rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan;
5. Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan pembangunan.

## 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Review terhadap rancangan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Inspektorat, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Inspektorat berdasarkan Rancangan RKPD.

Review terhadap rancangan RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

## REVIEW TERHADAP RKPD KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025

| RKPD KABUPATEN TAPIN | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tapin | **Level Kapabilitas APIP** | Level 3 | ***12.457.213.487*** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tapin | **Level Kapabilitas APIP** | Level 3 | ***12.457.213.487*** | |
| I | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tapin | Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat tepat waktu | 100 | 3.540.800 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tapin | Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat tepat waktu | 100 | 3.540.800 | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tapin | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | 572.800 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tapin | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | 572.800 | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tapin | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 558.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tapin | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 558.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tapin | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | 558.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tapin | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | 558.000 | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tapin | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | 298.000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tapin | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | 298.000 | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tapin | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | 1 | 298.000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tapin | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | 1 | 298.000 | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | | Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tapin | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 | 758.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tapin | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 | 758.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tapin | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 | 498.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tapin | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 | 498.000 | |
| II | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tapin | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | 100 | 8.919.791.356 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tapin | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | 100 | 8.919.791.356 | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tapin | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 | 8.800.071.356 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tapin | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 | 8.800.071.356 | |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tapin | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 | 109.930.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tapin | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 | 109.930.000 | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tapin | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | 4.995.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tapin | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | 4.995.000 | |
| 4 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Tapin | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 | 4.795.000 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Tapin | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 | 4.795.000 | |
| III | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tapin | Persentse pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 | 2.235.200 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tapin | Persentse pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 | 2.235.200 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Tapin | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | 2.235.200 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Tapin | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | 2.235.200 | |
| IV | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tapin | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu | 100 | 761.510.240 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tapin | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu | 100 | 761.510.240 | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Tapin | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 60 | 22.885.000 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Tapin | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 60 | 22.885.000 | |
| 2 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Tapin | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 40 | 83.678.400 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Tapin | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 40 | 83.678.400 | |
| 3 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Tapin | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 37 | 311.932.200 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Tapin | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 37 | 311.932.200 | |
| 4 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Tapin | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 40 | 343.044.640 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Tapin | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 40 | 343.044.640 | |
| V | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tapin | Persentase pemenuhan administrasi | 100 | 1.891.554.750 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tapin | Persentase pemenuhan administrasi | 100 | 1.891.554.750 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | perkantoran tepat waktu | | | | | perkantoran tepat waktu | | | |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tapin | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 | 39.056.100 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tapin | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 | 39.056.100 | |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tapin | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | 105.440.100 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tapin | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | 105.440.100 | |
| 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tapin | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 | 9.042.800 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tapin | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 | 9.042.800 | |
| 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tapin | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 | 214.412.200 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tapin | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 | 214.412.200 | |
| 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tapin | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 | 61.061.200 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tapin | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 | 61.061.200 | |
| 6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tapin | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 | 44.540.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tapin | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 | 44.540.000 | |
| 7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tapin | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 1.418.002.350 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tapin | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 1.418.002.350 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tapin | Persentase pengadaan BMD sesuai kebutuhan | 100 | 268.860.160 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tapin | Persentase pengadaan BMD sesuai kebutuhan | 100 | 268.860.160 | |
| 1 | Pengadaan Mebel | Tapin | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 | 153.957.100 | Pengadaan Mebel | Tapin | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 | 153.957.100 | |
| 2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tapin | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 | 114.903.060 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tapin | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 | 114.903.060 | |
| VII | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tapin | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu | 100 | 291.116.460 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tapin | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu | 100 | 291.116.460 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tapin | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 212.044.960 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tapin | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 212.044.960 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tapin | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 79.071.500 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tapin | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 79.071.500 | |
| VIII | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tapin | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 100 | 318.604.512 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tapin | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 100 | 318.604.512 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tapin | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 | 96.089.550 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tapin | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 | 96.089.550 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tapin | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 | 183.829.600 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tapin | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 | 183.829.600 | |
| 3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tapin | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 70 | 35.769.651 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tapin | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 80 | 35.769.651 | |
| 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tapin | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 22.915.720 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tapin | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 22.915.720 | |
| **2** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **Tapin** | **Indeks Manajemen Risiko** | **3** | **3.895.594.490** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **Tapin** | **Indeks Manajemen Risiko** | **3** | **3.895.594.490** | |
| | | **Tapin** | **Persentase SKPD yang menadapatkan nilai SAKIP minimal BB** | **100** | | | **Tapin** | **Persentase SKPD yang menadapatkan nilai SAKIP minimal BB** | **100** | | |
| | | **Tapin** | **Persentase IKK sesuai pedoman** | **100** | | | **Tapin** | **Persentase IKK sesuai pedoman** | **100** | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Tapin** | **Persentase Tindaklanjut hasil Rekomendasi BPK yang diselesaikan** | **100** | | | **Tapin** | **Persentase Tindaklanjut hasil Rekomendasi BPK yang diselesaikan** | **100** | | |
| I | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Tapin | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai standar | 100 | 2.880.437.340 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Tapin | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai standar | 100 | 2.880.437.340 | |
| 1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Tapin | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 82 | 1.019.884.260 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Tapin | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 82 | 1.019.884.260 | |
| 2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Tapin | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan | 40 | 581.726.950 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Tapin | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan | 40 | 581.726.950 | |
| | | | Pemerintah Daerah | | | | | Pemerintah Daerah | | | |
| 3 | Reviu Laporan Kinerja | Tapin | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 47 | 306.521.830 | Reviu Laporan Kinerja | Tapin | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 47 | 306.521.830 | |
| 4 | Reviu Laporan Keuangan | Tapin | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 2 | 38.000.280 | Reviu Laporan Keuangan | Tapin | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 2 | 38.000.280 | |
| 5 | Pengawasan Desa | Tapin | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 47 | 550.993.690 | Pengawasan Desa | Tapin | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 47 | 550.993.690 | |
| 6 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | Tapin | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil | 7 | 383.310.330 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan | Tapin | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil | 7 | 383.310.330 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | |
| II | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Tapin | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu | 100 | 1.015.157.150 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Tapin | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu | 100 | 1.015.157.150 | |
| 1 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Tapin | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 1 | 188.579.930 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Tapin | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 1 | 188.579.930 | |
| 2 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Tapin | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 20 | 826.577.220 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Tapin | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 20 | 826.577.220 | |
| **3** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **Tapin** | **Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi** | **3** | **818.927.880** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **Tapin** | **Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi** | **3** | **818.927.880** | |
| | | **Tapin** | **Persentase hasil Pendampingan dan Asistensi yang telah ditindaklanjuti** | **100** | | | **Tapin** | **Persentase hasil Pendampingan dan Asistensi yang telah ditindaklanjuti** | **100** | | |
| I | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan | Tapin | Persentase Kebijakan Teknis di Bidang | 100 | 29.404.020 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan | Tapin | Persentase Kebijakan Teknis di Bidang | 100 | 29.404.020 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fasilitasi Pengawasan | | Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum | | | Fasilitasi Pengawasan | | Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum | | | |
| 1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Tapin | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 1 | 27.246.020 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Tapin | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 1 | 27.246.020 | |
| 2 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Tapin | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 1 | 2.158.000 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Tapin | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 1 | 2.158.000 | |
| II | Pendampingan dan Asistensi | Tapin | Jumlah SKPD Strategis yang dilakukan pendampingan dan Asistensi | 24 | 789.568.860 | Pendampingan dan Asistensi | Tapin | Jumlah SKPD yang mengusulkan predikat WBK hingga TPN | 24 | 789.568.860 | |
| 1 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Tapin | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 13 | 138.593.060 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Tapin | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 13 | 138.593.060 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Tapin | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 24 | 114.032.000 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Tapin | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 24 | 114.032.000 | |
| 3 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Tapin | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 5 | 458.513.200 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Tapin | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 5 | 458.513.200 | |
| 4 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Tapin | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 3 | 78.430.600 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Tapin | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 3 | 78.430.600 | |
| | | | | | 17.171.780.857 | | | | | 17.171.780.857 | |

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2025, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari SOPD Inspektorat.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten di Kecamatan.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Usulan Program dan Kegiatandari Para Pemangku Kepentingan**
**Tahun 2025**
**Kabupaten Tapin**

Nama SOPD: SOPD INSPEKTORAT

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | IndikatorKinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# BAB III

# TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

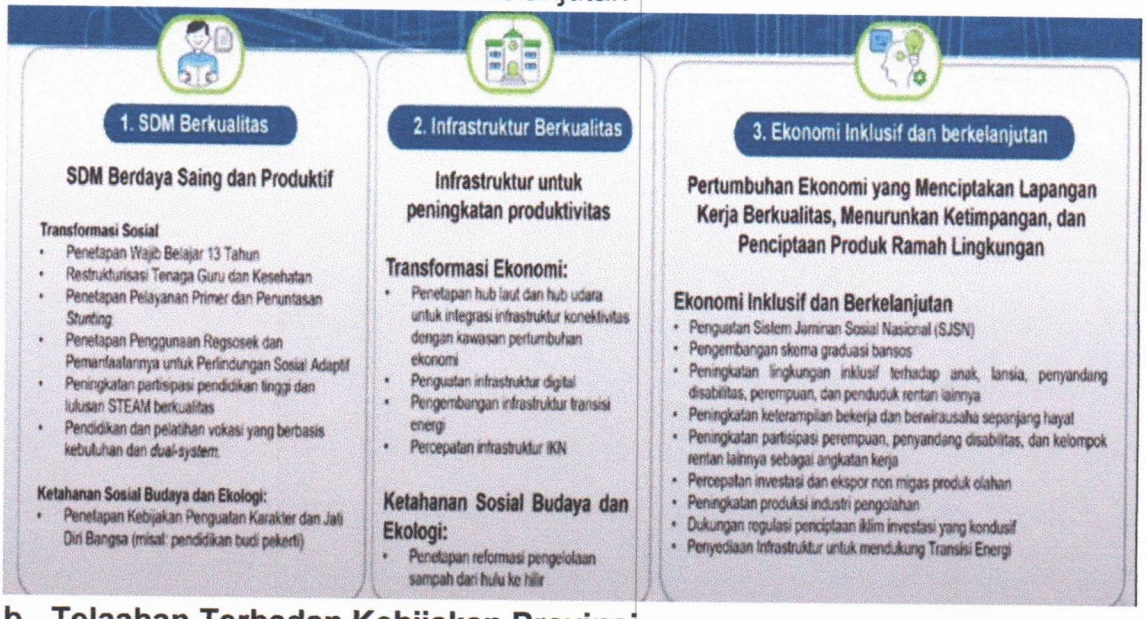
Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Inspektorat selama tahun 2025 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

## 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

### a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Kabupaten Tapin harus mampu mendukung dan sejalan dengan pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pusat (Nasional). Tema RKP 2025 "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

1. SDM Berkualitas
2. Infrasuktur Berkualitas
3. Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan




### b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Dalam mewujudkan keselarasan pembangunan dan memaksimalkan pencapaian wilayah Kabupaten Tapin yang berada didalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan maka keberhasilan pembangunan Provinsi juga dipengaruhi oleh dukungan dan keberhasilan pembangunan dari daerah Kab/Kota. Dengan berdasarkan permasalahan dan isu yang berkembang saat

ini Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan mengusung tema Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.

Berdasarkan tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dan rumusan prioritas, maka dapat dijabarkan kebijakan pembangunan daerah tersebut ke dalam 5 prioritas daerah sebagai berikut:

1. Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan
   1) Peningkatan produksi, produktivitas dan teknologi pertanian
   2) Peningkatan Rantai Pasok untuk mendukung Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan
   3) Peningkatan Pariwisata, Ekonomi kreatif, UMKM Berbasis Digital dan Berdaya Saing
   4) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja yang Berdaya Saing
   5) Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)
2. Pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
   1) Peningkatan angka rata-rata lama sekolah
   2) Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
   3) Peningkatan Akses Layanan Kesehatan
   4) Penurunan Prevalensi Stunting
   5) Penurunan Angka Pernikahan Anak
   6) Peningkatan Prestasi Olahraga
   7) Pengembangan Budaya Daerah
3. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi
   1) Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
   2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Menunjang Konektivitas antar Wilayah
   3) Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai gerbang logistik kalimantan
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi
   1) Penguatan Reformasi Birokrasi
   2) Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
   3) Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
   4) Pengembangan satu data Kalsel
   5) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)
   6) Revitalisasi BLUD
   7) Meningkatkan Investasi yang berdampak ke Daerah
5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana

1) Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
2) Penguatan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

## 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah darah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja Inspektorat selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Inspektorat pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2024 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

# RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
# INSPEKTORAT KAB. TAPIN
# TAHUN 2025

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **INSPEKTORAT** | | | | | | **17.171.780.857,00** | | | | | | | **17.178.518.857,00** | |
| | **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **17.171.780.857,00** | | | | | | | **17.178.518.857,00** | |
| | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | **17.171.780.857,00** | | | | | | | **17.178.518.857,00** | |
| 1. | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | - | **12.457.213.487,00** | | | | | | - | **11.618.442.457,00** | |
| | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 3.540.800,00 | | | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | - | 4.212.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 572.800,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 656.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 558.000,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 656.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 558.000,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 656.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 298.000,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 396.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 298.000,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 396.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 758.000,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 856.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 498.000,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 596.000,00 | INSPEKTORAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 8.919.791.356,00 | | | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | - | 8.309.901.256,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 39 Orang/bulan | 8.800.071.356,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 8.190.181.256,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 109.930.000,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 109.930.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 4.995.000,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 4.995.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 4.795.000,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 4.795.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 2.235.200,00 | | | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | - | 2.235.200,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 2.235.200,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 2.235.200,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 761.510.240,00 | | | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | - | 585.468.340,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 60 Paket | 22.855.000,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 29.711.500,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 40 Dokumen | 83.678.400,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 87.278.400,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 37 Orang | 311.932.200,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 196.332.200,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 40 Orang | 343.044.640,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 272.146.240,00 | INSPEKTORAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.891.554.750,00 | | | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | - | 1.881.910.600,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 39.056.100,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 39.056.100,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 105.440.100,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 105.440.100,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 9.042.800,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 9.042.800,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 214.412.200,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 214.190.600,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 61.061.200,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 57.209.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 44.540.000,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 44.540.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 1.418.002.350,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 1.412.432.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 268.860.160,00 | | | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | - | 243.219.300,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 153.957.100,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 143.602.100,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 114.903.060,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 99.617.200,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 291.116.460,00 | | | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | - | 272.888.460,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 212.044.960,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 193.816.960,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 79.071.500,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 79.071.500,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 318.604.521,00 | | | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | - | 318.607.301,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 96.089.550,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 96.089.550,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 10 Unit | 163.829.600,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 163.829.600,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 70 Unit | 35.769.651,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 35.769.651,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 22.915.720,00 | Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 22.918.500,00 | INSPEKTORAT |
| 2. | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | - | - | | | - | **3.895.594.490,00** | | | | | | - | **4.217.443.470,00** | |
| | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | - | - | | | - | 2.880.437.340,00 | | | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | - | 2.856.047.540,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 82 Laporan | 1.019.884.260,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 855.312.060,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah* | | | | 40 Laporan | 581.726.950,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 733.389.350,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja* | | | | 47 Laporan | 306.521.830,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 401.051.830,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan* | | | | 2 Laporan | 38.000.280,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 76.210.280,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa* | | | | 47 Laporan | 550.993.690,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 478.893.690,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP* | | | | 7 Dokumen | 383.310.330,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 311.190.330,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | - | - | | | - | 1.015.157.150,00 | | | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | - | 1.361.395.930,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani* | | | | 1 Laporan | 188.579.930,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 352.281.930,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu* | | | | 20 Laporan | 826.577.220,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 1.009.114.000,00 | INSPEKTORAT |
| 3. | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | - | - | | | - | **818.972.880,00** | | | | | | - | **1.342.632.930,00** | |
| | 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | - | - | | | - | 29.404.020,00 | | | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | - | 29.446.770,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun* | | | | 1 Rekomendasi | 27.246.020,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 27.246.020,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun* | | | | 1 Rekomendasi | 2.158.000,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 2.200.750,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | - | - | | | - | 789.568.860,00 | | | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | - | 1.313.186.160,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 13 perangkat daerah | 138.593.060,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 177.529.060,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi* | | | | 24 perangkat daerah | 114.032.000,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 380.308.820,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi* | | | | 5 Kegiatan | 458.513.200,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 630.556.080,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas* | | | | 3 perangkat daerah | 78.430.600,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | - | | 124.792.200,00 | INSPEKTORAT |
| | **JUMLAH** | | | | | | | **17.171.780.857,00** | | | | | | | **17.178.518.857,00** | |

## Tujuan dan Sasaran Inspektorat

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran (Impac) | Kondisi Awal | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik | | Indeks Reformasi Birokrasi | 55,00 | 73,89 | 57,00 | 59,00 | 61,00 |
| | | Mengoptimalkan pengendalian intern pemerintah daerah | Indeks Maturitas SPIP | 3,067 | 3,279 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| | | Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Unit Pelayanan Pemerintah Daerah | Persentase Unit Kerja Pelayanan yang diusulkan WBK hingga penilaiaan TPN | | | 100% | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP Pemda | 68,93 | 69,02 | 70,72 | 71,61 | 72,50 |
| | | | Nilai LPPD | 2,760 | 3,457 | 3,575 | 3,600 | 3,650 |
| | | | Opini Laporan Keuangan oleh BPK RI | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | Meningkatnya ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Persentase Ketepatan Rencana Aksi RB | | | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase capaianTarget Rencana Aksi RB | | | 100% | 100% | 100% |

## 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 beserta prognosisnya dapat dilihat sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f. Fasilitasi Kunjungan Tamu

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Mebel

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

9. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

c. Reviu Laporan Kinerja

2025

d. Reviu Laporan Keuangan

e. Pengawasan Desa

f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

10. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

C. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

11. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

12. Pendampingan dan Asistensi

a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Inspektorat TAHUN 2025

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan | | Pagu Indikatif |
|---|---|---|
| 1 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***12.457.213.487*** |
| I | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.540.800 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 572.800 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 558.000 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 558.000 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 298.000 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 298.000 |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 758.000 |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 498.000 |
| II | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8.919.791.356 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.800.071.356 |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100.930.000 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.995.000 |
| 4 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 4.795.000 |
| III | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 2.235.200 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2.235.200 |
| IV | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 761.510.240 |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 22.855.000 |
| 2 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 83.678.400 |
| 3 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 311.932.200 |
| 4 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 343.044.640 |
| V | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.891.554.750 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 39.056.100 |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 105.440.100 |
| 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 9.042.800 |
| 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 214.412.200 |
| 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 61.061.200 |
| 6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 44.540.000 |
| 7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.418.002.350 |
| VI | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 268.860.160 |
| 1 | Pengadaan Mebel | 153.957.100 |
| 2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 114.903.060 |
| VII | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 291.116.460 |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 212.044.960 |
| 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 79.071.500 |
| VIII | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 318.604.521 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 96.089.550 |
| 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 163.829.600 |
| 3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 35.769.651 |
| 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 22.915.720 |
| **2** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **3.895.594.490** |
| I | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 2.880.437.340 |
| 1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 1.019.884.260 |
| 2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 581.726.950 |
| 3 | Reviu Laporan Kinerja | 306.521.830 |
| 4 | Reviu Laporan Keuangan | 38.000.280 |
| 5 | Pengawasan Desa | 550.993.690 |
| 6 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan | 383.310.330 |

| | | |
|---|---|---|
| | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | |
| II | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 1.015.157.150 |
| 1 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 188.579.930 |
| 2 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 826.577.220 |
| **3** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **818.972.880** |
| I | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 29.404.020 |
| 1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 27.246.020 |
| 2 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 2.158.000 |
| II | Pendampingan dan Asistensi | 789.568.860 |
| 1 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 139.593.060 |
| 2 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 114.032.000 |
| 3 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 458.513.200 |
| 4 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 78.430.600 |
| | | 17.171.780.857 |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tapin tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tapin dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2025 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2026.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SOPD Inspektorat Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki SOPD Inspektorat Kabupaten Tapin, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern SOPD Inspektorat Kabupaten Tapin maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Tapin tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah.

**Pj. BUPATI TAPIN**

**MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd**